

**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



NIM. 2005-20-064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2013

HALAMAN PENGESAHAN PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PIDANA



Dr. H. HIDAYATULLAH, S.H, M.H

SUYOTO, S.H, M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMK

RISTAMADJI, S.H, M.H

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS- Al- Baqoroh 32)



Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Saudara-saudaraku tersayang;
3. Sahabat-sahabatku semua;
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis yakin bahwa tanpa dukungan dan bantuan oleh beberapa pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. H. Hidayatullah, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Suyoto, S.H, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Maret 2013

Penulis



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI” ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran pengaturan pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi, mengetahui aspek hukum penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui kendala/hambatan dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pemikiran pengaturan pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi adalah dikarenakan sistem pembuktian konvensional (sistem pembuktian negatif) yang dianut oleh KUHAP dianggap kurang efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Dikaji dari aspek hukum, penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan bangsa Indonesia.

Kendala dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kendala yuridis dan kendala praktis. Kendala yuridis yang muncul dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah tidak dikenalnya asas pembuktian terbalik dalam KUHAP yang digunakan sebagai dasar hukum penanganan tindak pidana korupsi, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dan menyimpangi ketentuan Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kendala praktis yang kemungkinan muncul dalam penerapan beban pembuktian terbalik pada penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah adanya kemungkinan semua PNS akan menjadi tersangka tindak pidana korupsi, semakin banyaknya praktik penyuapan, dan lambat proses penanganan perkara.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK SKRIPSI	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Tindak Pidana Korupsi	11
B. Pembalikan Beban Pembuktian	19
C. Kerugian Keuangan Negara	26
D. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi	31
 BAB III METODE PENELITIAN	 34
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	39
E. Metode Analisis Data	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
A. Latar Belakang Pemikiran Pengaturan Pembuktian Terbalik Pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi	 40
B. Aspek Hukum Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi	 50

C. Kendala Dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



